



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Kandidat Pengurus OJK di tangan Presiden
Tanggal : Selasa, 08 Maret 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 1

Profil Calon Ketua Dewan Komisiner OJK yang Periode 2022-2027



1. Mahendra Siregar

Posisi saat ini: **Wakil Menteri Luar Negeri RI**

Lahir di Bandung, 17 Oktober 1962

Mahendra sempat bergabung dengan Kementerian Koordinator Perekonomian menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Dorjaton Kuntjoro Jakti di 2001.

Mehendra juga pernah jadi Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional.

Menjadi wakil Menteri Perdagangan mendampingi Menteri Mari Elka Pangestu.

Menjadi Wakil Menteri Keuangan pada tahun 2011 mendampingi Menteri Agus Martowardojo.

Menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 2013

Pernah menjadi Direktur Utama pada Indonesia Eximbank.



2. Darwin Cyril Noerhadi

Posisi saat ini: **Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).**

Lahir di Jakarta, 11-April 1961.

Sempat jadi Komisaris Utama (Independen) PT Mandiri Sekuritas, Komisaris (Independen) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, dan Komisaris RS Hermina.

Pernah menjadi Direktur Utama dan *Senior Managing Director* Creador Indonesia.

Pernah jadi *Managing Director* PT Medco Energi Internasional Tbk, Partner PricewaterhouseCoopers Indonesia, Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta, Direktur Utama PT KDEI, dan Executive Director PT Danareksa.

Pernah jadi Konsultan & Peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID)-Departemen Keuangan.



3. Iskandar Simorangkir

Posisi saat ini: **Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

Lahir di Binjai, 4 Januari 1963.

Pernah menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia di 2014, Kepala Departemen Bank Indonesia, Kepala Biro/Grup Riset Ekonomi Bank Indonesia dan Peneliti Madya Senior Bank Indonesia.

Sumber: Wawancara KONTAN, Sekretariat Presiden



Sejumlah Pekerjaan Rumah dan Tantangan OJK

- 1 Meningkatkan literasi keuangan ke masyarakat. Mencakup produk investasi yang legal dan ilegal, profil risiko setiap produk investasi, serta memahami definisi lengkap pasar modal dan keuangan
- 2 Integrasi proses pengambilan kebijakan pimpinan OJK
- 3 Kebijakan cepat dan tepat untuk memitigasi pandemi covid-19 terhadap pemulihan ekonomi.
- 4 Meningkatkan kembali kepercayaan publik sebagai dampak dari munculnya permasalahan industri asuransi yang mempengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat.
- 5 Perlindungan investor dan nasabah di tengah upaya industri meningkatkan basis konsumen.
- 6 Pengembangan pasar, inovasi, dan produk beserta peraturannya.
- 7 Tantangan infrastruktur teknologi yang masih rentan dan SDM di tengah masifnya digitalisasi sektor jasa keuangan.



Calon Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK sebagai Ketua Komite Etik:

Mirza Adityaswara

Marwanto

Mohamad Fauzi

Maulana Ichsan

Calon Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK merangkap anggota:

Dian Ediana Rae

Agusman

Ogi Prastomiyono

Calon Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK merangkap anggota:

Hoesen

Inarno Djajadi

Doddy Zulverdi

Calon Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK merangkap anggota:

Pantro Pander Silitonga

Iwan Pasila

Adi Budiarmo

Calon anggota Dewan Komisiner OJK yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen:

Friderica Widiasari

Dewi

Hariyadi

Difi Johansyah

Maizal W, Akhmad S,
Kenia N, Ratih W

JAKARTA. Industri keuangan dan pasar modal semakin dinamis. Perkembangan teknologi menciptakan inovasi digital hingga tak cuma memunculkan peluang bisnis, tetapi juga tantangan yang besar bagi pembuat kebijakan.

Pemilihan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 bisa jadi momentum untuk menagih komitmen regulator dalam mengawasi industri dan melindungi investor di pasar keuangan dan pasar modal. Kemarin, nama-nama calon pengatur industri keuangan itu diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan sekaligus ketua panitia seleksi anggota dewan komisioner (DK) OJK Sri Mulyani menyebut, ada 21 calon anggota DK OJK yang telah lulus tahap keempat. Tiga calon Ketua DK OJK yang

diajukan adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Darwin Cyril Noerhadi dan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir (*lihat infografis*).

"Presiden nanti akan memilih dan menyampaikan 14 calon anggota DK OJK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masing-masing dua calon untuk setiap jabatan kemudian akan dilakukan proses pemilihan oleh DPR," ujar Sri, Senin (7/3).

Nah, kabar yang sampai KONTAN, perebutan kursi OJK 1 mengerucut pada dua nama, yakni Mahendra Siregar dan Cyril Noerhadi. Keduanya dinilai memiliki kans kuat un-

tuk menjabat Ketua OJK.

Nama Mahendra disebut sebagai calon terkuat untuk menduduki Ketua OJK. Namun demikian, pengalaman Cyril di dunia keuangan dan pasar modal dinilai lebih unggul dibandingkan dengan Mahendra.

Ekonom dan Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah berpendapat, pimpinan baru OJK harus bisa mewujudkan percepatan reformasi sektor keuangan terintegrasi di perbankan, industri keuangan non bank (IKNB), dan pasar modal. "Ketiga sektor masih jalan sendiri-sendiri, hingga perbaikan Undang-Undang OJK harus dilakukan karena menyangkut *decision making* di OJK," kata Piter.

Keputusan tertinggi yang selama ini ada di tangan Kepala Eksekutif Pengawas di tiap sektor menjadikan proses

pengambilan kebijakan di OJK tidak sempurna. Jika itu sudah bisa jalan, persoalan lain, menurut Piter, akan lebih mudah diselesaikan.

Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bidang Information and Applied Technology, Dody Dalimunthe menyoroti pengawasan ke depan agar bisa efektif membuat industri asuransi kembali sehat dan dipercaya publik. "Sistem pengaturan dan pengawasan harus terintegrasi dengan sektor lain dalam mendongkrak literasi dan perlindungan konsumen," tambah Dody.

Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan menyorot pengembangan pasar dan inovasi serta perlindungan investor. Contoh teknis, masih lemahnya perlindungan terhadap investor ritel saat emiten mengalami *delisting*. Pengawasan atas emiten dan lembaga profesi penunjang juga perlu ditingkatkan.

Menurut *Head of Business Development Division* Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi, literasi keuangan mutlak tidak hanya berkuat pada aspek investasi ilegal saja, namun juga semua

aspek agar masyarakat kian memahami pasar modal. Masyarakat juga dapat membedakan mana investasi yang legal dengan ilegal. "Masyarakat perlu memahami profil risiko masing-masing produk investasi," terang Reza.

Tentu, ini memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kebijakan di industri keuangan dan pasar modal. Tanpa itu, aksi penipuan berbasis digital seperti robot trading, pinjaman online ilegal dan investasi bodong berkedok koperasi akan terus berulang. ■